



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DIKY AGUNG SETIAWAN**
2. Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
3. NHK : **511687**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.120.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
2. Tanah Seluas 31526 m2 di KAB / KOTA ACEH SINGKIL, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. Tanah Seluas 23052 m2 di KAB / KOTA ACEH SINGKIL, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 287 m2/90 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
5. Tanah Seluas 965 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 138.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA AEROX 155 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, AVANZA 1495 CC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 16.000.000**

D. SURAT BERTAHAP **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 34.385.275**

F. HARTA LAINNYA **Rp. 20.000.000**



Sub Total	Rp.	1.328.385.275
III. HUTANG	Rp.	459.925.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	868.460.275

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.